BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam adalah aturan yang dibuat untuk mengatur bagaimana pembagian harta waris yang berlandaskan dengan dalil-dalil yang terdapat didalam ayat suci Al-Quran, Hadist, dan Ijtima para ulama yang digunakan sebagai pedoman dalam membagikan harta warisan. Dasar hukum waris Islam dinegara Indonesia terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam buku II mengenai hukum kewarisan. Sesuai dengan keberlakuan Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dinegara Indonesia sesuai dengan instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991. Dikatakan bahwa kompilasi ini dapat digunakan sebagai acuan dan panduan dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan Islam dilihat pada buku II pasal 171 s/d 191 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam prakteknya suatu sengketa waris yang terjadi dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan sengketa waris. Gugatan sengketa waris merupakan pengajuan permintaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang menolak permintaan pembagian tersebut. Sengketa yang dialami itu dinamakan dengan sengketa waris yakni permasalahan atau perselisihan yang terjadi mengenai kewarisan yang menyebabkan perbedaan pandangan dan pendapat mengenai kewarisan. Oleh karena itu untuk mencapai keadilan dan kesepakatan mengenai perbedaan pendapat dilakukan penyelesaian melalui lembaga pengadilan.

Namun dalam pembagian warisan yang dilakukan beberapa kali mengalami sengketa yang mengharuskan pengadilan untuk mengadili dan memberikan ketetapan hukum dalam pembagian warisan tersebut. Sengketa kewarisan tidak hanya terjadi mengenai pembagian harta waris kepada ahli warisnya. Namun terdapat beberapa alasan lain terjadinya sengketa waris seperti siapa yang berhak menjadi ahli warisnya, asal muasal harta peninggalan hingga pada perkara ini yang menjadi sengketa ialah objek sengketa waris yang masih belum jelas mengenai siapa pemegang hak milik yang sebenarnya dan apakah objek sengketa waris tersebut benar benar merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang sebelumnya telah meninggal dunia.

Apabila terjadi permasalahan atau perselisihan mengenai kewarisan Islam atau sengketa waris Islam. Salah satu pihak dapat mengajukan gugatan sengketa waris ke pengadilan agama dan melalui gugatan tersebut meminta kepada pengadilan agama untuk mengadili dan membagi harta warisan secara hukum yang berlaku dalam hal ini sebagai dasar hukum waris Islam yang berlaku diIndonesia. Sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 188 yang menyebutkan bahwa “Para ahli waris baik secara bersama-sama maupun perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan”.

Namun dalam mengajukan gugatan waris ke pengadilan juga perlu memperhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak. Dalam

gugatan siapa saja yang berhak ditarik untuk menjadi pihak penggugat maupun tergugat, kompetensi kewenangan relatif dan absolut sebuah pengadilan, hingga pada surat kuasa dalam gugatan jika menggunakan kuasa hukum dalam perkaranya. Gugatan diajukan perlu memperhatikan berbagai hal tersebut untuk menghindari gugatan yang diajukan ke pengadilan mengalami gugatan yang cacat formil sehingga berdampak pada pertimbangan dan putusan hakim nantinya.

Mengajukan gugatan sengketa waris diperlukan dokumen pelengkap yang menjadi dasar gugatan atau legal standing dari sebuah gugatan. Dalam gugatan sengketa waris yang menjadi perhatian legal standingnya ialah penetapan perkawinan dari pewaris yang dibuktikan dengan akta nikah atau penetapan istbat nikah yang dimintakan penetapannya melalui pengadilan. Mengajukan gugatan sebagai ahli waris karena perkawinan, maka wajib kepada pihak penggugat untuk melampirkan bukti perkawinan yang pernah dilakukan dibuktikan dengan buku akta nikah dari lembaga yang berwenang. Untuk mengetahui ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan perkawinan yang dilakukan sebelumnya.

Gugatan cacat formil adalah gugatan yang diajukan ke pengadilan yang tidak sesuai dengan formulasi atau persyaratan sebuah gugatan. Syarat formulasi gugatan harus diperhatikan oleh pihak penggugat seperti yang telah disebutkan diatas. Gugatan yang mengalami cacat formil pada persidangan akan berdampak pada putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelike verklaad*). Putusan gugatan tidak dapat diterima artinya ialah putusan yang dilakukan hakim tanpa memeriksa dan melakukan pertimbangan terhadap

pokok perkara. Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap formulasi gugatan yang diajukan apakah telah memenuhi persyaratan sebelum hakim melakukan pertimbangan lebih lanjut.¹

Suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979. Putusan *Niet ontvankelijke verklaad* atau NO merupakan suatu putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang telah dijelaskan oleh penulis diatas. Ini artinya bahwa gugatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh hakim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara dalam gugatan. sehingga putusan yang telah dijatuhkan tidak dapat dieksekusi lebih lanjut untuk dilakukan tindakan karena pokok perkaranya tidak dapat dilakukan pemeriksaan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

---

¹ M. Yahya Harahap, 2007, Hukum Acara perdata, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta hal 56.

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²

Pertimbangan hakim peradilan berdasarkan pada kekuasaan hakim yang memiliki kemandirian dalam memberikan keputusan dalam setiap Lembaga peradilan yang berlaku. Yang artinya adalah urusan peradilan tidak dapat mencampuri urusan kekuasaan kehakiman. Pihak lain tidak boleh mencampuri urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman, kecuali hal-hal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Berdasarkan Hukum Perdata Hakim Dalam Hukum Acara Perdata bersifat pasif, hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan Oleh karena itu, peran dan fungsi hakim Dalam proses perkara perdata, hanya sebatas :

- a. mencari dan menemukan kebenaran formil
- b. kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.³

---

² Joenadi Effendi, 2018 Rekonstruksi Dasar Perimbangan Hukum Hakim, Yogyakarta, Prenadadia Group, Jakarta. Hal 89

³ M. Taufik Mahakarao, 2009, Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 46

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah : **Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Mempawah Terhadap Gugatan Sengketa Waris Yang Mengalami Cacat Formil Pada Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mpw**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk melakukan analisis yang menjadi pertimbangan hukum hakim pengadilan agama terhadap putusan perkara Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mpw
2. Untuk melakukan analisis akibat hukum terhadap para pihak dalam putusan pengadilan agama dalam putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mpw

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya terjawab dengan baik.

a. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi sumbangsi pemahaman dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum waris dan gugatan waris bagi penulis, lingkungan kampus, masyarakat, dan

penegak hukum terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaad* dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan dan berguna bagi penulis dan masyarakat yang hendak melakukan gugatan sengketa waris dipengadilan, bagaimana prosedur dan tahapan dalam membuat gugatan yang baik dan benar, serta apa yang menjadi persyaratan formil maupun materil dalam suatu gugatan sehingga gugatan yang diajukan tidak mengalami cacat formil dalam proses persidangan serta masukan bagi penegak hukum terutama hakim bagaimana memberikan pertimbangan hukum terhadap gugatan waris dalam suatu putusan.

E. Kerangka pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Hukum waris Islam sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum waris Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan lainnya. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan berbagai karakteristik dari hukum kewarisan Islam tersebut.⁴

---

⁴ Amir Syariffudin, 2008, Hukum Kewarisan Islam, Cet. III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 16

Untuk mengatur bagaimana cara peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya atau yang disebut dengan mewarisi disebut dengan hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli waris. Hukum Waris Islam diatur didalam pasal 171 s/d 191 Kompilasi Hukum Islam INPRES No 1 Tahun 1991

Didalam hukum perdata jika terjadi suatu perselisihan antara kedua belah pihak yang saling bertentangan dan beda pendapat ialah dinamakan dengan sengketa. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai perkara yang timbul salah satunya adalah sengketa waris yakni dimana kedua belah pihak saling bertentangan untuk memperebutkan sebuah harta warisan. Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan disuatu lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Lembaga peradilan yang berwenang sebagai wadah masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai salah satu wujud dari tujuan adanya hukum.

Dalam hukum kewarisan Islam diatur mengenai gugatan sengketa waris Islam yakni dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 “Para ahli waris baik secara bersama-sama maupun perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak

menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan”⁵

Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah gugatan berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.⁶ Perselisihan atau sengketa waris dilakukan dengan mengajukan gugatan sengketa waris. Gugatan sengketa waris adalah gugatan atau tuntutan yang diajukan ke pengadilan karena terdapat sengketa terhadap objek sengketa harta waris yang diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Gugatan cacat formil adalah gugatan yang diajukan ke pengadilan tidak sesuai dengan persyaratan formil dalam mengajukan sebuah gugatan. Syarat formil tersebut telah disebutkan diatas untuk diperhatikan oleh para pihak yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang mengalami cacat formil pada persidangan berdampak pada putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaad*). Putusan tidak dapat diterima artinya ialah putusan yang dilakukan hakim tanpa memeriksa pokok perkara didalam gugatan tersebut. Terlebih dahulu hakim mempertimbangkan gugatan yang cacat formil.

Dijelaskan pula dalam bukunya M. Yahya Harahap bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain gugatan yang

---

⁵ Mardanai, 2014, Hukum Kewarisan Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 77

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta. hal.29

ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No 4 tahun 1996. Selain itu gugatan yang mengandung cacat formil didalamnya terdapat penyebab lain yakni antara lain:

1. Gugatan tidak memiliki *legal standing* sebagai dasar gugatan yang diajukan.
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk dikualifikasi atau *plurium litis consortium*
3. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut dan relatif kewenangan peradilan.⁷

Pemahaman terhadap hukum formil dan materiil merupakan prinsip gugatan, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Sangat sulit menemukan penggugat yang mengetahui hukum formil dan materiil secara utuh, meskipun kadang-kadang perkara yang diajukan mempergunakan jasa advokat. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materiil adalah sebagaimana tertuang dalam pasal HIR dan pasal RBg dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materiil.

Putusan hakim atau putusan pengadilan atau dikenal juga dengan sebutan "*vonnis*" adalah suatu produk dari perkara *contensius*, yaitu perkara

---

⁷ M. Yahya Harahap, 2007, Hukum Acara Perdata, , Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta

perdata yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara, yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dalam bentuk gugatan. Sedangkan gugatan merupakan suatu surat yang diajukan oleh orang atau pihak atau kuasanya pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Untuk menyelesaikan atau mengakhiri sebuah sengketa yang terjadi dilakukan dengan putusan akhir ialah putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada suatu tingkat peradilan tertentu. Berdasarkan hubungan hukum yang terjadi terhadap sebuah putusan akhir terdapat tiga jenis putusan tersebut yakni :

1) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku;
- (2) Gugatan mengandung *error in persona*;
- (3) Gugatan di luar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan;
- (4) Gugatan *obscur libel*;

(5) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*; (6)

Gugatan masih prematur;

(7) Gugatan daluwarsa.

2) Menolak gugatan penggugat

Alasan bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.

3) Mengabulkan gugatan penggugat

Berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, dalam putusan ini terjadi koreksi hubungan hukum ke arah yang menguntungkan pihak penggugat. Sekaligus koreksi ini itu dibarengi dengan pembebanan kewajiban hukum kepada tergugat berupa hukuman untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu.

Adapun ditinjau Berdasarkan sifat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum. Terdapat tiga jenis kekuatan hukum dalam putusan akhir hakim yakni diantaranya :

- 1) Putusan *Deklaratoir* adalah pernyataan hakim yang bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan

- 2) Putusan *Constitutif* adalah pernyataan hakim yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru setelah putusan dijatuhkan
- 3) Putusan *Condematoire* adalah pernyataan hakim dalam putusan yang berisikan penghukuman kepada para pihak yang berpekar dipengadilan.⁸

Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim peradilan berdasarkan pada kekuasaan hakim yang memiliki kemandirian dalam memberikan keputusan dalam setiap Lembaga peradilan yang berlaku. Yang artinya adalah urusan peradilan tidak dapat mencampuri urusan kekuasaan kehakiman. Pihak lain tidak

---

⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), h. 13

boleh mencampuri urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman, kecuali hal-hal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

b. Kerangka Konsep

Dalam warisan atau hukum waris terdapat 3 unsur penting didalam sebuah kewarisan yakni adanya:

1. Pewaris, adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan,
2. Ahli waris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris
3. Harta warisan adalah harta bawaan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁹

---

⁹ Abdurrahman, 1995, Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Akamedika Pressinda, Jakarta

Sengketa waris terjadi karena adanya perselisihan dalam kewarisan baik penetapan ahli waris hingga pada objek dan pembagian harta warisan. Jika terjadi sengketa waris maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan sengketa waris ke pengadilan. Dan jika pihak yang bersengketa merupakan orang Islam maka gugatan sengketa waris dilakukan dipengadilan agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara mengenai sengketa waris.

Dalam mengajukan gugatan sengketa waris, pihak yang mengajukan gugatan harus memperhatikan gugatan yang diajukan agar tidak mengalami cacat formil pada gugatannya. Dampak gugatan cacat formil dalam persidangan ada pada pertimbangan dan putusan hakim nantinya. Didalam pertimbangan hakim dalam gugatan sengketa waris, hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan terhadap gugatan yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum melakukan pertimbangan terhadap pokok perkara gugatan.

Akibat hukum yang terjadi terhadap gugatan sengketa yang mengalami cacat formil oleh hakim dapat dijatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Pertimbangan hakim terhadap gugatan, jika terdapat gugatan yang mengalami cacat formil maka hakim tidak lagi melakukan pertimbangan terhadap pokok perkaranya. Menghadapi gugatan cacat formil maka hakim dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusannya bahwa menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*). Karena didalam putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima maka dari itu untuk pokok perkara gugatan hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

F. Metode penelitian

Metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang hendak untuk melakukan sebuah penelitian, dengan metode arah penelitian yang hendak didiberikan oleh penulis dapat dimengerti dengan baik bahwa ranah sebuah penulisan penelitian dimana dan seperti apa nantinya. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2013, hlm. 2) yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis seperti yang telah ditelusuri dalam filsafat ilmu.¹⁰ Dalam menulis sebuah penelitian ini maka penulis melakukan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif Dilakukan dengan menggunakan sebuah hukum sekunder dalam menentukan sebuah titik permasalahan

---

¹⁰ Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif R&D, Alfabeta, Bandung

untuk dicari penyelesaiannya dengan menekankan dan berdiri tegak dalam segi-segi yuridis untuk suatu peraturan maupun keputusan hukum. Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif penulis melakukan analisa rumusan masalah dalam ruang lingkup pendekatan analisis konsep hukum dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan serta buku-buku lainnya sebagai sumber hukum dari penyelesaian suatu permasalahan.

Soerjono soekanto mengatrikan pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diambil sebagai data pendukung penelitian sebagai dasar untuk dilakukan penelitian dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang ada pada penelitian.¹¹

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga

---

¹¹ Soerjono soekanto, 2009, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali pers, Jakarta, Cet Ke-8

dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian ini menganalisis sebuah kasus mengenai sengketa waris Islam yang memiliki keputusan *niet onvankelijke verklaad*. Penulis melakukan analisis pada pertimbangan hakim didalam putusannya apa yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya putusan tersebut. Sehingga dapat menemukan pokok permasalahan kasus yang dibahas pada penelitian ini.

3. Sumber Data

Penulis melakukan pencarian data dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang berisikan dalam kaitannya didalam permasalahan yang diangkat penulis untuk menemukan sebuah peraturan hukum yang pasti sebagai acuan dalam kebenaran penelitian seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, *HIR*, *Rbg*, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung, serta aturan hukum yang menyangkut pada permasalahan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan penulis untuk mencari petunjuk dan penjelasan sebagai pelengkap terkait permasalahan yang diangkat kemudian dapat dianalisa.

Bahan yang digunakan dalam sumber hukum sekunder seperti buku-buku tentang mewarisi, pertimbangan hakim, dan dasar gugatan serta doktrin para ahli hukum terkait hukum waris, gugatan waris dan pertimbangan hakim. .

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum setelah primer dan sekunder yang digunakan penulis untuk memberikan segala informasi mengenai akibat hukum. Bahan yang digunakan ialah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, jurnal dan pengertian-pengertian hukum kewarisan dan permasalahan kewarisan yang menyangkut pada penelitian ini.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum penulis melakukan cara dengan Studi kepustakaan. Penulis melakukan studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dari bahan hukum primer seperti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, *HIR*, *Rbg*, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta asas-asas hukum yang berlaku menyangkut pada permasalahan pada penelitian. Dan juga mempelajari bahan hukum sekunder seperti buku yang menyangkut permasalahan waris-mewaris, gugatan waris pertimbangan hakim serta literatur lainnya yang relevan dengan topik permasalahan penelitian. Dan menemukan informasi

5. Teknik Dan Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan sebuah putusan terhadap suatu perkara. Teknik yang dilakukan ialah melakukan penelitian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proporsisi, pernyataan rumusan norma keputusan, baik yang diterima dalam bahan primer maupun bahan hukum sekunder.

Terhadap pertimbangan hakim penulis melakukan analisa Berdasarkan Hukum Perdata Hakim Dalam Hukum Acara Perdata yang bersifat pasif, yakni hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan Oleh karena itu, peran dan fungsi hakim Dalam proses perkara perdata, hanya sebatas :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran formil terhadap suatu perkara melalui dasar gugatan serta posita dan petitum gugatan oleh penggugat
- b. Kebenaran yang diwujudkan oleh pertimbangan hakim melalui putusan hakim yang sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.